

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Gambaran Umum PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920an dengan nama *Waterleiding* sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai *Suido Syo*.

a. Kurun 1400an

Pada tahun 1443 terekam adanya bukti tertulis sebagaimana dilaporkan bahwa pada masa itu air yang merupakan minuman sehari-hari orang Asia Tenggara dialirkan dari gunung mengalir kerumah-rumah penduduk dengan pipa bambu.

b. Kurun 1600an

Dimulailah penjajahan Belanda melalui misi dagangnya yang terkenal VOC, kemudian mereka membumi hanguskan Bandar Sunda Kelapa dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, resmilah Belanda menjajah Indonesia dengan diselingi oleh penjajah Perancis (1808-1811) dan penjajahan Inggris (1811-1816) penduduk Jakarta waktu itu sekitar 15.000 jiwa dan air minum masih sangat sederhana dengan memanfaatkan sumber air permukaan (sungai) yang pada masa itu kualitasnya masih baik. Di Asia Tenggara kebiasaan penduduk untuk mengendapkan air

sungai dalam gentong atau kendi selama 3 minggu atau satu bulan telah dilakukan untuk mendapatkan air minum yang sehat.

c. Kurun 1800an

Di Pulau Jawa sebagaimana dilaporkan oleh *Raffles* pada tahun 1817 penduduk selalu memasak air terlebih dulu dan diminum hangat-hangat untuk menjamin kebersihan dan kesehatan dan dilaporkan bahwa orang Belanda mulai mengikuti kebiasaan ini terutama di Kota Banjarmasin yang airnya keruh.

Pada tahun 1818 salah satu syarat penting untuk pemilihan pusat kota serta Istana Raja ditentukan oleh faktor tersedianya air minum.

Di Jakarta tahun 1882 tercatat keberadaan air minum di Tanah Abang yang mempunyai kualitas jernih dan baik yang dijual oleh pemilik tanah dengan harga F 1,5 per drum, sedangkan untuk air sungai dijual 2-3 sen per pikul (isi dua kaleng minyak tanah).

Pada masa pra-kemerdekaan, Dinas Pengairan Hindia Belanda (1800 - 1890) membangun saluran air sepanjang 12 kilometer dan bendungan yang mengalirkan air dari Sungai Elo ke pusat kota Magelang untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan mengairi sawah di wilayah Magelang.

Pemerintah Penjajahan Hindia Belanda di Surabaya, tahun 1890, memberikan hak konsesi kepada pengusaha Belanda warga Kota Surabaya, Mouner dan Bernie, yang dinilai berjasa merintis penyediaan air bersih di Surabaya. Konsesi ini berupa pengelolaan mata air Umbulan, Pasuruan, untuk dialirkan ke Kota Surabaya dengan memasang pipa sepanjang 20 kilometer selama dua tahun. Tahun 1900, pemerintah mendirikan perusahaan air minum dan instalasinya diresmikan tiga tahun kemudian. Untuk memberikan proteksi pada perusahaan tersebut, pemerintah mewajibkan penghuni rumah mewah untuk menjadi pelanggan. Tiga tahun

setelah berdirinya perusahaan air minum itu, sambungan instalasi air minum di Surabaya mencapai 1.588 pelanggan. Status perusahaan air minum pada bulan Juli 1906 dialihkan dari pemerintah pusat menjadi dinas air minum kotapraja (kini PDAM Kota Surabaya).

d. Kurun 1900-1945

Pada tahun 1905 terbentuklah Pemerintah Kota Batavia dan pada tahun 1918 berdiri PAM Batavia dengan sumber air bakunya berasal dari Mata Air Ciomas, pada masa itu penduduk kurang menyukai air sumur bor yang berada di Lapangan Banteng karena bila dipakai menyeduh teh menjadi berwarna hitam (kandungan Fe/besi nya tinggi).

e. Kurun 1945-1965

Tahun 1953 dimulailah pembangunan Kota Baru Kebayoran di Jakarta, pada saat itu dilakukan pelimpahan urusan air minum ke pemerintah Propinsi Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1959 terbentuklah Djawatan Teknik Penjehtan yang mulai mengurus air minum, dimulai pembangunan air minum di kota Jakarta (3.000 l/dt), Bandung (250 l/dt), Manado (250 l/dt), Banjarmasin (250 l/dt), Padang (250 l/dt) dan Pontianak (250 l/dt) dengan sistim “turn key project” loan dari Pemerintah Perancis. Terbitlah UU no. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan mulailah dibentuk PDAM sampai sekarang.

f. Kurun 1965-1969

Melalui SK Menteri PUTL no 3/PRT/1968 lahir Direktorat Teknik Penyehatan, Ditjen Cipta Karya. Tiga waduk yang dibangun di wilayah Jawa Barat dengan membendung Sungai Citarum, yaitu Waduk Jatiluhur (1966), Waduk Cirata (1987), dan Waduk

Saguling (1986) menandai era dimulainya penanganan sumberdaya air secara terpadu. Waduk Jatiluhur, seluas sekitar 8.300 hektare, dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 240.000 hektare sawah di empat kabupaten di utara Jawa Barat. Air waduk juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 150 MW dan sebagai sumber air baku untuk air minum Jakarta (sekitar 80% kebutuhan air baku untuk Jakarta dipasok dari waduk ini melalui Saluran Tarum Barat).

g. Kurun 1969-1973 (Pelita I- Pelita II)

Dalam Pelita I (1969 - 1973), kebijaksanaan pembangunan air minum dititik beratkan pada rehabilitasi maupun perluasan sarana-sarana yang telah ada, serta peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan baru dan seluruhnya didanai oleh APBN. Target pembangunan sebesar 8.000 l/detik. Pembangunan air minum melalui pinjaman OECF (*overseas economic cooperation fund*) di kota-kota Jambi, Purwokerto, Malang, Banyuwangi dan Samarinda.

Pada Pelita II (1974 - 1978) pemerintah mulai menyusun rencana induk air bersih, perencanaan rinci dan pembangunan fisik di sejumlah kota. Pada saat itu Pemerintah mulai menyusun Rencana Induk (*master plan*) Air Minum bagi 120 kota, DED untuk 110 kota dan RAB untuk 60 kota, dan pengembangan institusi. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan air minum dengan mendorong dilakukannya peralihan status dari Jawatan/Dinas menjadi **Perusahaan Daerah Air Minum**. Dimulai pembangunan Air Minum di 106 Kabupaten/Kota, yang dilanjutkan pembentukan BPAM (Badan Pengelola Air Minum) sebagai embrio **PDAM** yang mengelola prasarana dan sarana air minum yang telah selesai dibangun. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam

pembangunan ‘unit produksi’ dan Pemda di jaringan distribusi, dalam perjalanan waktu kebijakan ini agak tersendat oleh karena keterlambatan Pemda dalam menyiapkan dana “sharingnya”.

h. Kurun 1979-1983 (Pelita III)

Periode berikutnya (Pelita III, 1979 - 1983), pembangunan sarana air minum diperluas sampai kota-kota kecil dan ibu kota kecamatan, melalui pendekatan kebutuhan dasar. Pada awal tahun 1981 pula diperkenalkan “dekade air minum” (Water Decade) yang dideklarasikan oleh PBB.

i. Kurun 1984-1998 (Pelita IV- Pelita VI)

Pada Pelita IV (1984 - 1988) pembangunan sarana air minum mulai dilaksanakan sampai ke perdesaan Target perdesaan 14 juta jiwa di 3.000 desa. Diawal era 90-an terjadi perubahan organisasi yang tadinya berbasis sektoral, menjadi berbasis “wilayah”. Dimulai didengungkannya program KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di sektor air minum, contohnya mulai digarap Air Minum “Umbulan” Kabupaten Pasuruan sayang belum bisa terealisasi karena adanya kendala “tarif air minum-nya” serta masalah kebijakan Pemda lainnya.

j. Kurun Waktu 1998 – sekarang

Pada tahun terbit Permen OTDA No. 8/2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi PDAM yang berlaku sampai sekarang. Program WSSLIC I dilanjutkan pada tahun ini dengan nama WSLIC II (Water and Sanitation for Low Income Community). Pada tahun 2002 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yang akan menjadikan pedoman dalam monitoring kualitas air minum yang diproduksi oleh PDAM. Dalam rangka

meningkatkan kinerja PDAM dan pembangunan sistem penyediaan air minum, dilakukan upaya perumusan kebijakan melalui Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), untuk merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penyehatan PDAM melalui peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta/investor.

Dimulai tahun 2004 inilah merupakan tonggak terbitnya peraturan dan perundangan yang memayungi air minum yaitu dimulai dengan terbitnya UU no 7 Tahun 2004 tentang SDA (Sumber Daya Air). Setelah 60 tahun Indonesia merdeka pada tahun ini Indonesia baru memiliki peraturan tertinggi disektor air minum dengan terbitnya PP (Peraturan Pemerintah) No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (Sistim Penyediaan Air Minum). Dengan dimulainya kembali pembinaan Air Minum dari yang semula berbasis “wilayah” menjadi berbasis “sektor” lahir kembali Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Air Minum keluarlah kebijakan “Penyehatan PDAM” yang dimulai dengan dilakukannya Bantek Penyehatan PDAM.

Tahun 2009 adanya gagasan 10 juta SR (Sambungan Rumah) dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dep PU telah menghitung dana yang dibutuhkan sekitar Rp 78,4 trilyun, yang terdiri dari kebutuhan pembangunan unit air baku 85.000 l/detik sebesar Rp 7,4 trilyun, peningkatan unit produksi 65.000 l/detik sebesar Rp. 17 trilyun, dan peningkatan unit distribusi dan sambungan rumag sebesar Rp. 54 trilyun Pembangunan IKK yang telah dimulai kembali tahun 2007 juga dilanjutkan dengan membangun 150an IKK (bp).

Kronologis perkembangan Perusahaan Air Daerah Minum kota Semarang sampai sekarang telah mengalami 3 (tiga) zaman, yaitu :

a. Zaman Hindia Belanda (1911 s/d 1923).

Untuk mencukupi kebutuhan air minum bagi kota Semarang, pihak Belanda membangun 4 (empat) sumber alam yaitu : Moedal Besar, Moedal Kecil, lawang dan Ancar. Pada tahun 1923 s/d 1932 dibangun lagi 2 sumber alam, yaitu Kalidoh Besar dan Kalidoh Kecil. Selanjutnya pada tahun 1979 Kalidoh Kecil diserahkan pada PDAM Kecamatan Ungaran.

b. Zaman Penjajahan Jepang (8 Desember 1932 s/d 14 Agustus 1945)

Gemeente Water Leiding Semarang diubah dalam bahasa Jepang menjadi Semarang *Siya Kusno* yang artinya Perusahaan Air Minum Semarang.

c. Zaman Pemerintahan Republik Indonesia.

Pada tahun 1952, untuk menambah kapasitas air maka dibangun 2 sumur arteis lagi di jalan Purwogondo dan Jalan Arjuno. Pada tahun 1959 s/d 1965 status berubah menjadi Dinas Penghasilan Kotapraja Semarang. Pada tahun ini juga dibangun Instalasi Penjernihan Bahan baku Kaligarang yang diambil dari sungai Kaligarang dengan debit 500 l/dt. Berdasarkan SK DPRD nomor 48/KEP/D{RD/64 tanggal 22 Desember 1964 statusnya berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotapraja Semarang.

Pada Tahun 1967 s/d 1984 dibangun sumur arteis dan Kantor Pusat PDAM antara lain : Sumur artesis di Ronggowarsito, Kinibalu, Brumbung, Manyaran, Mijen, Rejosari, Seleses, Abimanyu, Senjoyo, Citadui, Blimbing, Bugangan dan Kencono Wungu. Pada tahun 1994 dibangun Instansi Pengolahan Air Minum yang menggunakan bahan baku Sungai Kaligarang yang

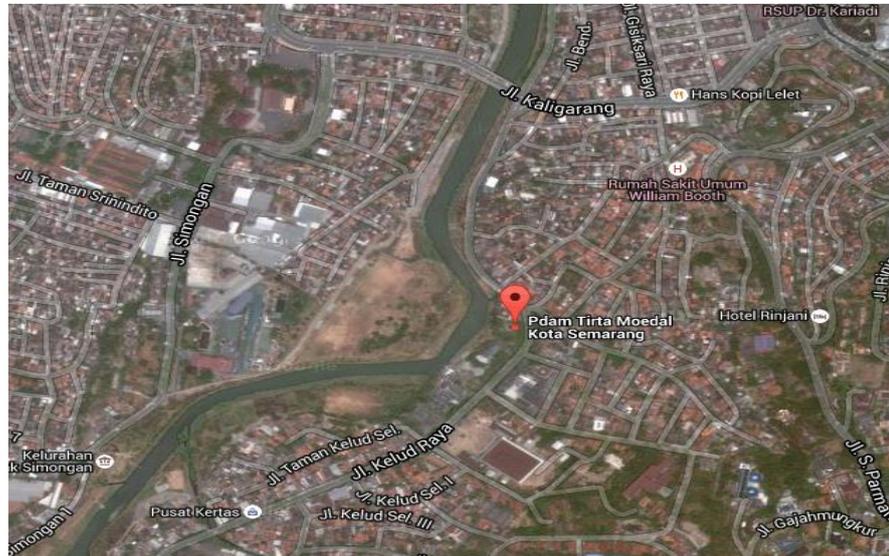
teletak di jalan Kelud Raya sebesar 250 l/dt, IPA Pucang Gading sebesar 50 l/dt, serta mengoptimalkan IPA *Miniplant* Kaligarang dari 40 l/dt menjadi 80 l/dt.

Pada tanggal 20 Oktober 2002 PDAM membangun Instalasi Air Kudu dengan kapasitas 1250 l/dt untuk memperbaiki aliran di sebagian wilayah tengah dan perluasan wilayah timur, wilayah industri dan pelabuhan. Pada saat ini perkembangan debit / kapasitas terpasang dari 230 l/dt menjadi 2650 l/dt. Namun kebutuhan saat ini 3500 l/dt, dengan itu PDAM masih bersih.

Saat ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat yang menyediakan air bersih untuk masyarakat kota Semarang. Secara geografis wilayah kota Semarang terletak pada posisi astronomi di antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur sehingga kota Semarang berada di lokasi perbukitan dan pesisir pantai. Menurut batas wilayah administratif kota Semarang terbagi atas wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, wilayah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Demak, wilayah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ungaran.

Gambar 2.1.

Peta Denah Lokasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang



Sumber : www.googlemap.com

Peta Pelayanan PDAM Kota Semarang dalam cakupan pendistribusian air bersih wilayah Kota Semarang per April 2015 berjumlah 154.299 pelanggan. Adapun rinciannya dari tahun 2011 sampai dari tahun 2011 sampai 2015 akhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Jumlah Pelanggan PDAM Kota Semarang

Tahun 2011-2015 akhir

Tahun	Jumlah Pelanggan
2011	138.412 pelanggan
2012	141.563 pelanggan
2013	144.838 pelanggan
2014	152.014 pelanggan
2015 per April	154.299 pelanggan

Sumber : PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Demi terwujudnya suatu kondisi pengairan suatu wilayah yang optimal, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang memiliki visi dan misi yang berguna untuk mewujudkan pengairan suatu wilayah yang optimal.

1. Visi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

“Menjadi Perusahaan Daerah Penyedia Air Minum Terbaik di Indonesia”.

2. Misi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

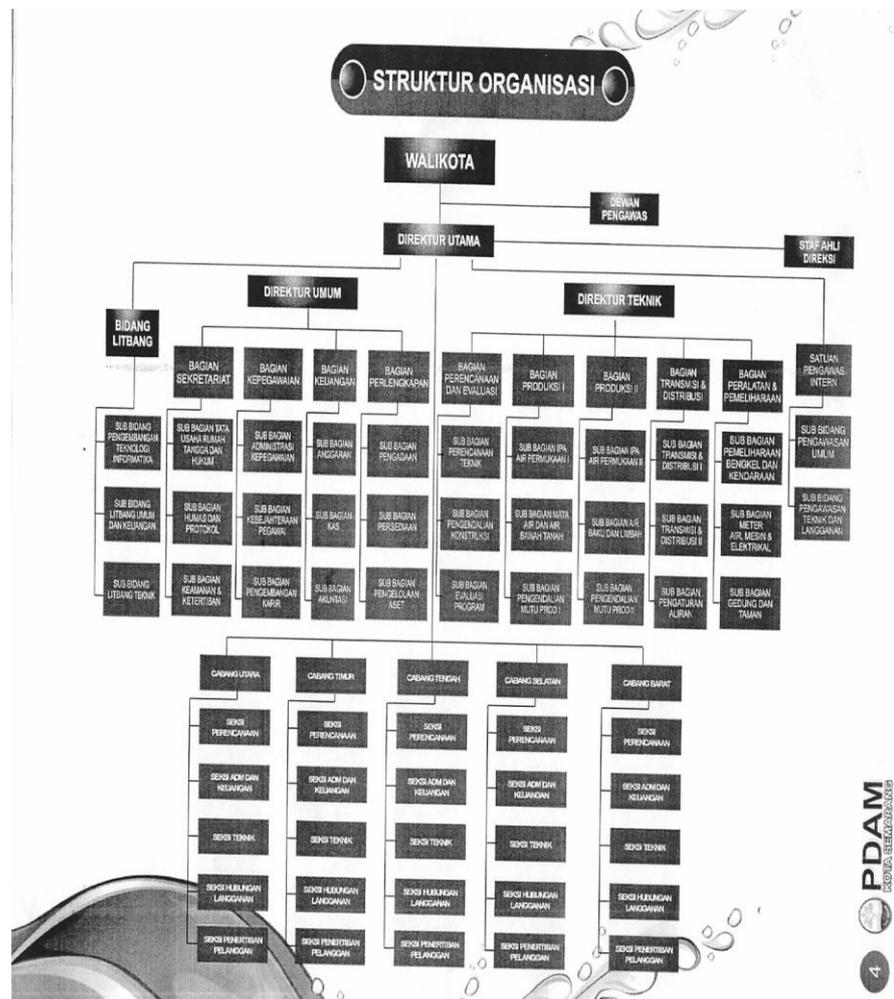
- Mandiri dalam pengelolaan perusahaan.
- Memberikan pelayanan prima secara efektif dan efisien.
- Menyediakan air minum yang terjangkau masyarakat dengan memenuhi standar kapasitas, kuantitas, dan kualitas kesehatan.
- Mengembangkan kapasitas karyawan yang profesional dengan menerapkan teknologi tepat guna memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang berkesinambungan.

2.2. Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Semarang tercantum dalam SK Walikota Semarang No. 690/225/Th. 1989, tanggal 1 Juni 1989, kemudian pada tanggal 29 Januari 2004 berubah SK Walikota Semarang No. 061.1/15.

Gambar 2.2.

Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang



Sumber : PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Keputusan Walikota Semarang No. 061.1/15 tahun 2004

1. Direktur Utama

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan pengelolaan PDAM sesuai dengan rencana anggaran perusahaan dan peraturan perundang – undangan, serta mempertanggung jawabkan penggunaan dan pengelolaan kekayaan Negara atau daerah yang ditanamkan di dalam perusahaan. Selain itu Direktur Utama mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Direktur Utama harus mengarahkan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan bawahan.

2. Staf Ahli Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama dibantu oleh Staf Ahli Direksi yang mempunyai tugas melakukan fungsi mendukung dan membantu dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, membangun jaringan usaha dan kemitraan, membangun citra baik perusahaan, menjalin hubungan baik dengan *stakeholder*, menjadi fasilitator dan mediator dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan serta menjadi agen perusahaan.

3. Direktur Umum

Direktur Umum memiliki tugas untuk merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas dan pengolahan perlengkapan serta mengkoordinasi dan mengendalikan tugas di bidang administrasi dan keuangan, kepegawaian, serta sekretariat.

Direktorat Umum membawahi beberapa bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- **Bagian Sekretariat**

Bagian Sekretariat bertugas untuk menghimpun, mengkoordinasi, merencanakan, dan melaksanakan program kegiatan, pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana, pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi tata persuratan, kearsipan, inventarisasi barang dan rumah tangga, pengkoordinasian penyusunan data, informasi, dan dokumentasi serta penyelenggaraan perpustakaan, pengkoordinasian dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Hukum
- b. Sub Bagian Humas dan Protokol
- c. Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban

- **Bagian Kepegawaian**

Bagian Kepegawaian memiliki tugas mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian, melaksanakan proses kegiatan penggajian, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, mutasi, kesejahteraan pegawai dan pembinaan pegawai, mengurus proses askes, taspen, dan proses pegawai yang telah mencapai usia pensiun dan penghargaan, memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Direksi tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu tentang kepegawaian, membuat laporan kegiatan bagian kepegawaian dan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugasnya yang diberikan oleh atasan. Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai
- c. Sub Bagian Pengembangan Karier

- **Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan memiliki tugas mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, mengadakan program pendapatan dan pengeluaran keuangan, merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan, serta membuat laporan kegiatan bagian keuangan. Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Kas
- c. Sub Bagian Akuntansi

- **Bagian Perlengkapan**

Bagian Perlengkapan memiliki tugas untuk menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan, melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan, pengawasan dan pengendalian di bidang perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang perlengkapan, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengadaan
- b. Sub Bagian Persediaan
- c. Sub Bagian Pengelolaan Aset

4. **Direktur Teknik**

Direktur Teknik memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber air, dan sumber mata air tanah, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, teknik, produksi, distribusi, meter air dan air kotor,

serta mengkoordinasikan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia.

Direktorat Teknik membawahi beberapa bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Bagian Produksi

Bagian Produksi memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas air, termasuk rencana kebutuhan material produksi, mengatur dan menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenagaan, kualitas dan laboratorium, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, mengadakan penelitian terhadap proses produksi agar lebih efisien dan efektif serta membuat laporan kegiatan bagian produksi.

Bagian Produksi terdiri dari :

- a. Sub Bagian IPA Air Permukaan
- b. Sub Bagian Air Mata dan Air Bawah Tanah
- c. Sub Bagian Air Baku dan Limbah
- d. Sub Bagian Pengendalian Mutu Produksi

- Bagian Transmisi dan Distribusi

Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas untuk mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi agar dapat berfungsi dengan baik, mengatur distribusi air secara merata kepada pelanggan dan menyelesaikan angsuran di bagian distribusi, membuat peta jaringan pipa dan perlengkapannya, serta membuat laporan kegiatan distribusi. Bagian Distribusi terdiri dari

:

- a. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi I
- b. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi II
- c. Sub Bagian Pengaturan Aliran

- Bagian Peralatan dan Pemeliharaan

Bagian Peralatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemasangan jaringan pipa distribusi sesuai program perusahaan, melakukan pemeliharaan kendaraan, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dan jaringan pipa distribusi termasuk pengurusan pipa, melakukan pengaturan aliran air melalui pengaturan *valve* untuk menjamin supply air ke pelanggan, melakukan pemantauan jaringan dalam upaya menurunkan tingkat kehilangan air. Bagian Peralatan dan Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pemeliharaan Bengkel dan Kendaraan
- b. Sub Bagian Meter Air, Mesin, dan Elektrikal

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas melaksanakan administrasi perusahaan, melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan perusahaan. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana, melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, serta mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan perusahaan. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informatika
- b. Sub Bidang Litbang Umum dan Keuangan
- c. Sub Bidang Litbang Teknik

6. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melakukan audit intern terhadap administrasi/keuangan teknik dan pengelolaan penggunaan seluruh kekayaan perusahaan, mengadakan pengawasan atas anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur menurut

ketentuan-ketentuan yang berlaku, mengadakan pengawasan keamanan dan ketentuan perusahaan. Satuan Pengawas Internal terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengawasan Umum
- b. Sub Bidang Pengawasan Teknik dan Langgan

7. Kantor Cabang

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memiliki 5 kantor cabang, yaitu Cabang Utara, Cabang Timur, Cabang Barat, Cabang Tengah, serta Cabang Selatan. Kantor Cabang tersebut bertugas untuk menyelenggarakan pemasaran, pelayanan pelanggan dan mengurus penagihan rekening langganan, menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan pelanggan, pengolahan rekening serta pengolahan data langganan, menyelenggarakan fungsi pengawasan pencatatan meter air, pengendalian pencatatan, membuat laporan kegiatan bagian hubungan langganan. Kantor Cabang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan
- b. Seksi Administrasi dan Keuangan
- c. Seksi Teknik
- d. Seksi Hubungan Langganan
- e. Seksi Penertiban Pelanggan

Tabel 2.2.

Daftar Status Pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang pada Tahun 2016

Status Pegawai	Jumlah	Presentase (%)
Pegawai Perusahaan	505	95%
Pegawai Honorer	16	3%
Calon Pegawai	3	1%
Pegawai Kontrak	10	1%
Jumlah	534	100%

Sumber : PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, April 2016

Berdasarkan tabel 2.2. disimpulkan bahwa antara pegawai honorer, pegawai perusahaan, calon Pegawai, dan pegawai kontrak, jumlahnya yang terbanyak adalah pegawai perusahaan dengan presentase 95% dari jumlah pegawai yang ada di ruang lingkup PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, sisanya yaitu terbagi di pegawai honorer sebesar 3%, calon pegawai 1%, dan pegawai kontrak sebesar 1%.

Tabel 2.3.

Jumlah Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan
PDAM Tirta Moedal Kota Semarang pada Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
SD	34	8%
SLTP	40	9%
SLTA	279	53%
Diploma	50	14%
Sarjana	123	15%
Pasca Sarjana	8	1%
Jumlah	534	100%

Sumber : PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, April Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2.3. dapat di ambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan pegawai yang bekerja di lingkungan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang tertinggi yaitu lulusan SLTA dengan presentase sebesar 53% yang kedua yaitu lulusan Sarjana dengan presentase 15%, ketiga lulusan Diploma sebesar 14%, keempat yaitu lulusan SLTP dengan presentase 9%, kelima yaitu lulusan SD sebesar 8%, keenam yang terakhir yaitu lulusan Pasca Sarjana dengan presentase sebesar 1%. Lulusan SLTA lebih banyak karena rata-rata pegawai yang sudah lama bekerja di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dari lulusan SLTA.

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai di lingkungan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menurut Gender pada Tahun 2016

Gender	Jumlah	Presentase(%)
Pegawai Pria	426	78%
Pegawai Wanita	108	22%
Jumlah	534	100%

Sumber : PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, April Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2.4. maka disimpulkan bahwa jumlah pegawai Pria lebih banyak daripada jumlah pegawai wanita dengan presentase pegawai pria 78%, dan pegawai wanita sebesar 22%. Jumlah pegawai pria lebih banyak karena di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja pria dibanding wanita serta banyaknya pekerjaan di lapangan (luar ruang kantor) dan bersentuhan langsung dengan segi teknik pasti membutuhkan tenaga kerja ahli pria.

2.3. Wilayah Kerja PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Berdasarkan Pembagian Cabang

Terdapat 5 cabang kantor pelayanan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang terdiri dari :

1. Kantor Cabang Semarang Tengah

Alamat : Jl. Kelud Raya No.60, Petompon, Gajahmungkur, Semarang.

Telepon : (024) 8443260

Batas Wilayah :

Utara : Jalan A. Yani, Jalan Pandanaran.

Barat : Banjir Kanal Barat

Selatan : Jalan Tol

Timur : Jalan MT. Haryono, Jalan Dr. Wahidin

Jumlah Pelanggan : 20.482 Pelanggan Aktif

2. Kantor Cabang Semarang Selatan

Alamat : Jl. Teuku Umar No.56, Semarang

Telepon : (024) 7472934

Batas Wilayah :

Utara : Jalan Tol, Jalan Dr Wahidin, Jalan Tentara Pelajar Selatan

Barat : Kali Kripik, Sumur Jurang

Selatan : Kalidoh Timur sampai dengan Barat

Timur : Jalan Tol, Salak Utama, Batas Kabupaten Semarang

Jumlah Pelanggan : 25.755 Pelanggan Aktif

3. Kantor Cabang Semarang Timur

Alamat : Jl. Prangkesit Raya, Tlogosari, Semarang

Telepon : (024) 6732848

Batas Wilayah :

Utara : Laut Jawa

Barat : Sungai Banjir Kanal Timur, Jalan Brigjen Sudiarto Selatan,
Jalan Kumpul Maksum Timur, Jalan Mataram Timur
(pasar Peterongan sampai dengan Jalan Tentara Pelajar)

Selatan : Jalan Tentara Pelajar, Jalan Raya Kedung Mundu sampai
dengan Perumahan Klipang Permai

Timur : Kabupaten Demak (sayung sampai dengan Mranggen)

Jumlah Pelanggan : 43.215 Pelanggan Aktif

4. Kantor Cabang Semarang Barat

Alamat : Jl. WR. Supratman No.25, Semarang

Telepon : (024) 7603320

Batas Wilayah :

Utara : Laut Jawa

Barat : Kabupaten Kendal

Selatan : Kabupaten Semarang sampai dengan
Kecamatan Boja (Kabupaten Kendal)

Timur : Banjir Kanal Barat

Jumlah Pelanggan : 32.468 Pelanggan Aktif

2.4. Potensi Pajak

Potensi Pajak di lingkup PDAM Tirta Moedal Kota Semarang meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 25, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Air Permukaan. Berdasarkan pengklasifikasian lapangan usaha dapat diketahui bahwa sektor jasa-jasa yang didalamnya termasuk pula Jasa Pelayanan Publik atau Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib).